



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat serta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020.

Kami berharap melalui Laporan Kinerja ini, dapat terlihat sasaran yang telah tercapai maupun yang belum dapat dicapai, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Januari 2021



Eko D. Heripoerwanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.3. ISU STRATEGIS.....	14
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. URAIAN SINGKAT REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.....	18
2.1.1. Tujuan dan Kegiatan Strategis.....	20
2.1.2. Program dan Kegiatan.....	23
2.2. PERJANJIAN KINERJA	24
2.3. METODE PENGUKURAN.....	25
2.4. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA	41
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI	45
3.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	45
3.2. SARANA DAN PRASARANA.....	51
3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	54
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA	57
4.1. CAPAIAN KINERJA	57
4.1.1. Capaian Indikator Kinerja Program	62
4.1.2. Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II.....	67
4.2. PERBANDINGAN KINERJA	83
4.2.1. Perbandingan Capaian Sasaran Program.....	83
4.2.2. Perbandingan Capaian FLPP	87
4.2.3. Perbandingan Capaian SSB dan SBUM	87
4.2.4. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran.....	88
4.3. REALISASI ANGGARAN	91

BAB 5 PENUTUP	96
5.1 KESIMPULAN.....	96
5.2 REKOMENDASI	98
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sesuai PUPR Nomor 03/PRT/M/2019	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sesuai Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020	14
Gambar 2.1 Redesain Program Penganggaran Kementerian PUPR	18
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	25
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	25
Gambar 3.1 Persentase SDM Per Unit Kerja Eselon II.....	46
Gambar 3.2 Persentase PNS Menurut Golongan.....	47
Gambar 3.3 Persentase SDM Menurut Jenis Kelamin	47
Gambar 3.4 Persentase PNS Menurut Usia	47
Gambar 3.5 Persentase SDM Menurut Jenjang Pendidikan	48
Gambar 3.6 Persentase PNS Menurut Jabatan.....	48
Gambar 3.7 Hubungan Empat Perspektif <i>Balanced Scorecard</i>	49
Gambar 3.8 SKP Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.....	50
Gambar 4.1 Struktur Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	59
Gambar 4.2 Perumahan Subsidi	62
Gambar 4.3 Persentase Responden Survey.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perubahan Nama Unit Kerja Eselon II	2
Tabel 2.1	Target Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	41
Tabel 2.2	Target Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	42
Tabel 2.3	Target Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	42
Tabel 2.4	Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	43
Tabel 2.5	Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	43
Tabel 2.6	Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	43
Tabel 2.7	Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	44
Tabel 2.8	Target Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	44
Tabel 3.1	Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Eselon II.....	45
Tabel 3.2	Jumlah PNS Menurut Golongan.....	47
Tabel 3.3	Jumlah SDM Menurut Jenis Kelamin	47
Tabel 3.4	Jumlah PNS Menurut Usia	47
Tabel 3.5	Jumlah SDM Menurut Pendidikan	48
Tabel 3.6	Jumlah PNS Menurut Jabatan	48
Tabel 3.7	Daftar Sarana dan Prasarana	52
Tabel 4.1	Perubahan Nama Unit Kerja Eselon II.....	57
Tabel 4.2	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020.....	60
Tabel 4.3	Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.....	63
Tabel 4.4	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi KPBU yang Sudah Siap Lelang..	66
Tabel 4.5	Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	68
Tabel 4.6	Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	70

Tabel 4.7	Proyek KPBU Bidang SDA.....	70
Tabel 4.8	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA.....	71
Tabel 4.9	Daftar Proyek KPBU Bidang Jalan dan Jembatan yang Siap Lelang	72
Tabel 4.10	Daftar Proyek KPBU Bidang Jalan dan Jembatan (<i>Solicited</i>)	73
Tabel 4.11	Daftar Proyek KPBU Bidang Jalan dan Jembatan (<i>Unsolicited</i>)	75
Tabel 4.12	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	76
Tabel 4.13	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	77
Tabel 4.14	Realisasi Bantuan Pembiayaan Perumahan	79
Tabel 4.15	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	79
Tabel 4.16	Proyek KPBU Bidang Permukiman	80
Tabel 4.17	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	81
Tabel 4.18	Capaian Kinerja PPDPP.....	82
Tabel 4.19	Perbandingan Capaian Kinerja DJPI.....	83
Tabel 4.20	Perbandingan Capaian Sasaran Program Terhadap Renstra Tahun 2020-2024.....	86
Tabel 4.21	Perbandingan Antara Realisasi BA. 033 Tahun 2019 Dengan Tahun 2020	89
Tabel 4.22	Realisasi Masing-Masing Unit Kerja Eselon II.....	92
Tabel 4.23	Realisasi FLPP Per Bulan	93

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024, telah dijabarkan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS3) dan (SS5), yaitu:

1. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: **Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni**;
2. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja: **Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif**;

Tujuan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam menyediakan pembiayaan perumahan adalah Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.

Dalam mencapai kedua indikator kinerja program di atas, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggunakan 2 (dua) mata anggaran, yaitu BA.033 dan BA. 999 dengan rincian sebagai berikut:

- BA. 033 sebesar Rp643.609.701.000,00;
- BA. 999.03 sebesar Rp9.000.000.000.000,00 untuk menyalurkan FLPP. Selain menggunakan anggaran dari DIPA, penyaluran FLPP pada tahun 2020 juga menggunakan proyeksi pengembalian pokok sebesar

Rp2.000.000.000.000,00, sehingga total anggaran penyaluran FLPP tahun 2020 sebesar Rp11.000.000.000.000,00; dan

- BA. 999.07 sebesar Rp5.721.982.299.000,00 untuk menyalurkan SSB dan SBUM.
- BA. 999.99 merupakan anggaran untuk Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum yang nilainya sebesar Rp258.800.000.000,00

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Realisasi BA. 033 sebesar Rp288.423.015,00 atau 44,81%;
- Realisasi anggaran penyaluran FLPP sebesar Rp11.231.193.635.691,00 atau sebesar 102,10%;
- BA. 999.07 sebesar Rp3.395.273.697.529,00 atau 59,33%.

Pada TA. 2020, Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja, dapat disimpulkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 dapat mencapai target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian **116,88%**. untuk indikator kinerja sasaran program masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan hanya tercapai **70,88%** dan Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif **98,83%**.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang menyebutkan bahwa Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/ Lembaga menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, maka Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diwajibkan untuk menyusun rencana strategis, perjanjian kinerja, rencana aksi, laporan monev, dan laporan kinerja yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2020, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024.

Dalam melaksanakan kinerja tahun 2020 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menjalankan tugas

dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja maka, perlu untuk menyusun laporan kinerja tahun 2020.

Laporan kinerja ini disusun dan dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebagai koordinator penyusunan Laporan Kinerja di internal Kementerian PUPR, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai koordinator penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode RPJMN 2020-2024. Pada tahun ini terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adanya peraturan tersebut maka di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ada perubahan nomenklatur pada unit kerja Eselon II. Adapun perubahan pada Unit Kerja Eselon II adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perubahan Nama Unit Kerja Eselon II

Permen PUPR No. 03/PRT/M/2019	Permen PUPR No. 13 Tahun 2020
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan
Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

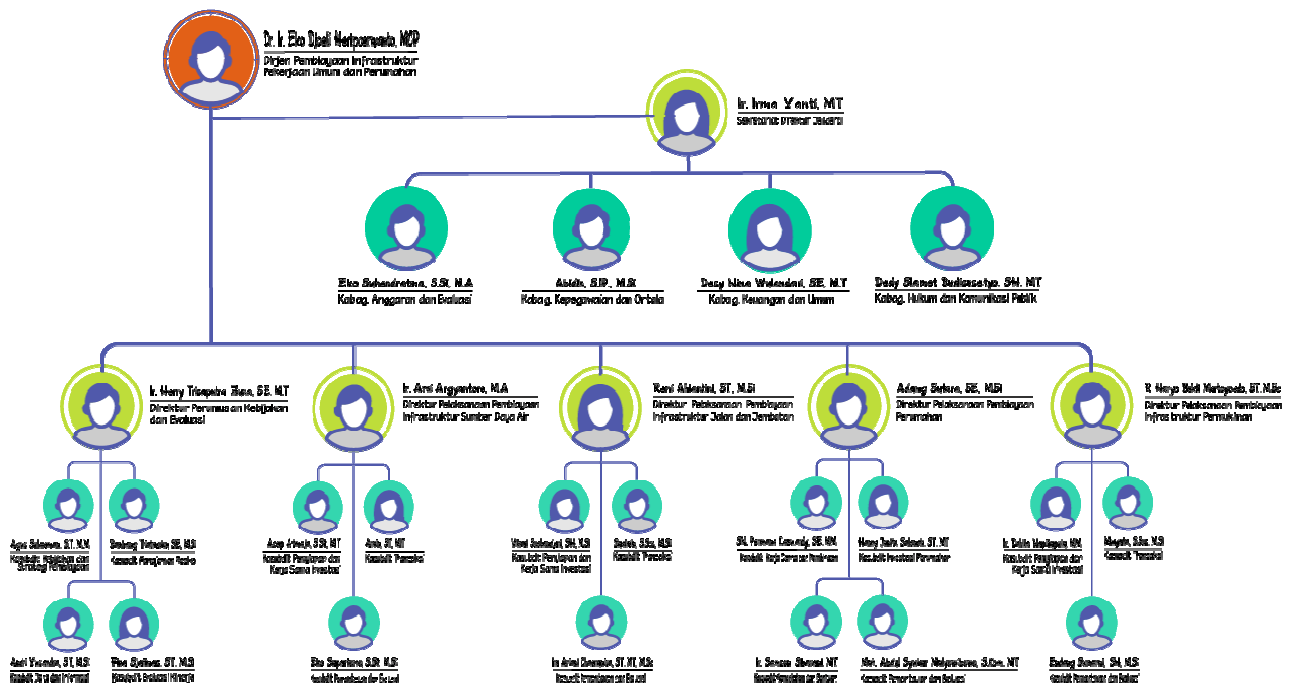
Permen PUPR No. 03/PRT/M/2019	Permen PUPR No. 13 Tahun 2020
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Pada awal tahun 2020 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam Peraturan Menteri tersebut DJPI memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan layanan investasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- e. penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- f. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan

- infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 - j. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun bagan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sesuai PUPR Nomor 03/PRT/M/2019

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berikut disampaikan kerangka kelembagaan di DJPI sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Unit

Kerja Eselon 2 Mandiri BLU PPDPP sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan unit organisasi yang akan mengemban sebagian Tugas dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan melaksanakan program pengembangan pendanaan dan sistem pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024.

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta dipimpin oleh Direktur Jenderal.

2. Tugas

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan

- peraturan perundangundangan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 - d. penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 - e. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 - f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 - i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki 6 (enam) unit kerja Eselon II dan 1 (satu) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

- Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal
- Fungsi : - Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi

keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
- Pelaksanaan penatausahaan BMN;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional;
- Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- Pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, terdiri dari:

- Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
- Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan

- perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 - Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - Pembinaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
 - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, terdiri dari:

- Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur;
- Sub Direktorat Kepatuhan Intern; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi : - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, terdiri dari:

- Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Fungsi : - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terdiri dari:

- Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan

infrastruktur permukiman.

- Fungsi :
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
 - Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
 - Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
 - Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
 - Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
 - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman terdiri dari:

- Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi;
- Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- Sub Bagian Tata Usaha.

6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan

pembiayaan perumahan.

- Fungsi :
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 - Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 - Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 - Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan;
 - Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
 - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari:

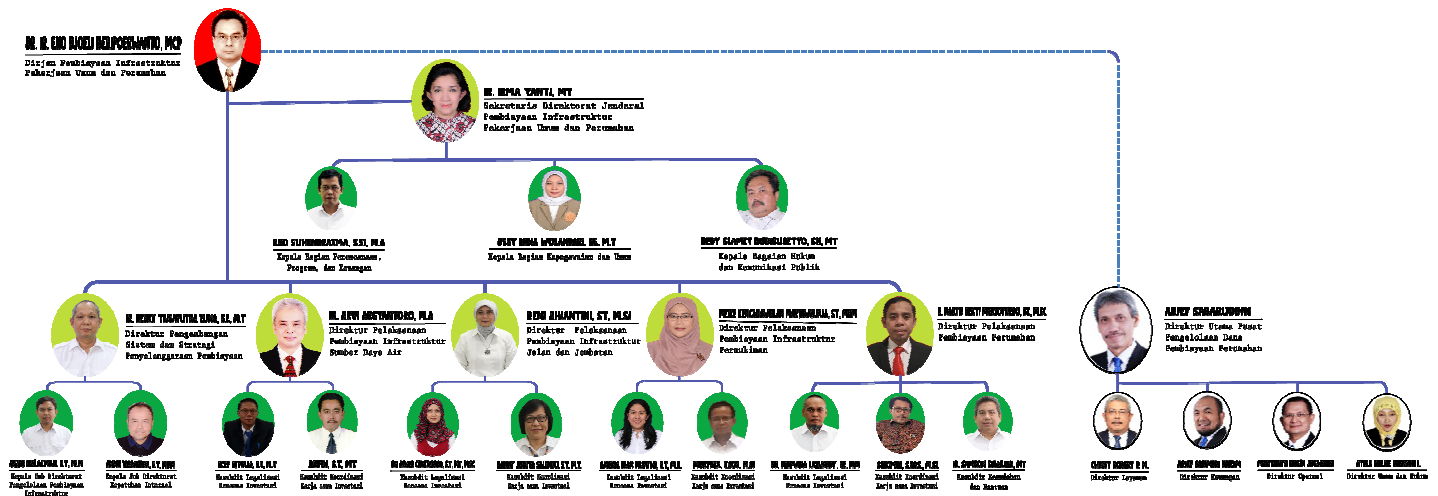
- Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;

- Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi;
- Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan;
dan
- Subbagian Tata Usaha.

7. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Tugas : Melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan

Fungsi : - Pelayanan pembiayaan perumahan;
- Pengelolaan keuangan
- Pengelolaan operasi kegiatan
- Pengelolaan urusan umum dan hukum
- Pelaksanaan pemeriksaan intern



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Sesuai Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020

1.3. ISU STRATEGIS

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai institusi yang mengemban amanah penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Indonesia, telah melakukan berbagai upaya dan strategi percepatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur.

Selama periode 2015-2019, capaian pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Air, yaitu meliputi pembangunan dan rehabilitas/peningkatan bendung/waduk/embung /bangunan penampung air lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2019 meliputi: bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru, embung yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah, 1.005.402 Ha jaringan irigasi baru telah terbangun, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 3.021.105 Ha, pembangunan air baku sebanyak 30,70 m³/detik, pembangunan/rehabilitasi pengendali sedimen dan lahar sebanyak 330 buah dan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali daya rusak air sebanyak 1.485 km.

Jalan dan Jembatan, yaitu capaian 2015-2019 untuk pembangunan jalan dan jembatan baru dengan panjang masing-masing 3.867km dan 58.346m. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah membangun jalan bebas hambatan sepanjang 1.500km.

Perumahan, meliputi pembangunan rumah susun sebanyak 48.792 unit, rumah khusus 23.960 unit, rumah swadaya sebanyak 735.856 unit dan bantuan PSU Perumahan 119.612 unit. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2015-2019 sebanyak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707,212 unit.

Permukiman, yaitu pembangunan SPAM sebanyak 21.499,5 lt/detik di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 3.173 lt/detik di tahun 2019. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan penanganan kawasan kumuh sebanyak 23.407 Ha di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 8.815 Ha di tahun 2019.

Adapun untuk rencana pembangunan infrastruktur di periode 2020-2024, sesuai Visium Kementerian PUPR 2030, memproyeksikan kebutuhan investasi untuk mendanai kebutuhan infrastruktur selama lima tahun

adalah sebanyak Rp 2.058 Triliun. Sesuai dengan tren ketersediaan APBN, kebutuhan pendanaan tersebut diproyeksikan tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah dan diperkirakan hanya mampu untuk mendanai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau sebesar Rp 623 Triliun. Sehingga terdapat *gap funding* untuk penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama lima tahun kedepan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan sebuah kebutuhan mendesak, oleh karenanya Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif untuk memenuhi *gap funding* yang ada. Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian PUPR serta membentuk Unit Organisasi yang secara khusus menangani pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Amanat untuk penyelenggara pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) mengingat besarnya *gap funding* penyediaan infrastruktur yang ada.

Isu strategis lainnya yang dihadapi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu: (1) Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN; (2) Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan; (3) Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU; (4) Keterbatasan dokumen KPBU

yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU; (5) Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama; (6) Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU; (7) Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN; (8) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK; (9) Ketersediaan lahan yang *clear* dan *clean* untuk proyek KPBU, serta (10) Isu-isu strategis yang terkait dengan sektor pembiayaan perumahan yang merupakan domain Unit Organisasi sebelumnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan pembiayaan infrastruktur yang tidak mudah, namun Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tetap merasa optimis dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya. Hal ini dikarenakan potensi pembiayaan KPBU yang sangat besar. Sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, jenis proyek yang dapat menggunakan skema KPBU adalah sebagai berikut: (1) Jalan dan Jembatan, meliputi Jalan Tol, Jalan Nasional dan Jembatan; (2) Sumber Daya Air, meliputi waduk/bendungan, bendung, saluran pembawa air baku dan jaringan Irigasi; (3) Infrastruktur Permukiman, meliputi infrastruktur air minum, sistem pengelolaan air limbah domestik dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; serta (4) Perumahan, meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara yang pemanfaatannya dengan cara sewa.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Didalam RPJP pada RPJM ke-4 dimantapkan bahwa arah pembangunan 2020 – 2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR akan dilaksanakan melalui 5 Program adalah sebagai berikut:

	PROGRAM EKISTING	REDESAIN PROGRAM
SETJEN	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Peningkatan Sarpas ASN Kementerian PUPR 	Program Dukungan Manajemen
ITJEN	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	Program Dukungan Manajemen
BPSDM	Program Pengembangan SDM Bidang PUPR	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
BPIW	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Program Dukungan Manajemen
DJBK	Program Pembinaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
DJPI	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJCK	Program Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJP	Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJSDA	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo 	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Kelolaan Sumber Daya Air
DJBM	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Manajemen Program Infrastruktur Konektivitas

Gambar 2.1 Redesain Program Penganggaran Kementerian PUPR

Arah kebijakan PUPR bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah peningkatan peran dan kontribusi BUMN, BUMD, dunia usaha dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem dan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

Sementara untuk Arah kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visium PUPR 2020-2024;
5. Percepatan proses perencanaan dan penyiapan KPBU;
6. Percepatan proses pengadaan KPBU;
7. Pengembangan skema pembiayaan KPBU;
8. Membentuk unit pelaksana teknis/ memanfaatkan unit kerja eksisting yang berfungsi sebagai *paying agent* serta fungsi lainnya yang terkait

dengan pengelolaan anggaran dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;

9. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
10. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
11. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
12. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*refinancing*);
13. Percepatan operasionalisasi BP Tapera; dan
14. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

2.1.1. Tujuan dan Kegiatan Strategis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan beberapa tujuan Kementerian dalam 2020-2024 yang terdiri dari:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - b. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - c. Kapasitas tampung per kapita;
 - d. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - b. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - b. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.

5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:

- a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
- b. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
- c. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
- d. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
- e. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
- f. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, DJPI mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS3) dan (SS5), yaitu:

1. **Sasaran Strategis ketiga (SS-3)**, yakni: meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
 - b. **Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;**
2. **Sasaran Strategis kelima (SS-5)**, yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - b. **Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;**
 - c. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - d. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;

- e. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
- f. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Berdasarkan potensi, permasalahan, tantangan lingkungan strategis kedepan, dan keterkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, DJPI menetapkan tujuan Unit Organisasi Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Percepatan Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pembiayaan kreatif dan inovatif; dan
2. Peningkatan Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

2.1.2. Program dan Kegiatan

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, pada program ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:
 - a. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR; dan
 - b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada program ini ada 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:
 1. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Dari IKSP di atas maka akan diturunkan menjadi beberapa kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan, adapun kegiatan pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

1. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
4. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
5. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
6. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan; dan
7. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Selama periode tahun 2020, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyusun 2 (dua) Perjanjian Kinerja. Pertama, Perjanjian Kinerja awal antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Perjanjian Kinerja awal ini Indikator Kinerja Sasaran Program masih menyesuaikan dengan DIPA tahun 2020. Kedua, Perjanjian Kinerja revisi antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perjanjian Kinerja revisi perlu ditetapkan karena pada bulan September 2020, Renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024 resmi diterbitkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terkait indikator serta target berdasarkan Renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024. Berikut Perjanjian Kinerja awal serta revisi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN			
1	Meningkatnya pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1 Tingkat ketersediaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	16%
		2 Tingkat aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah terhadap kemudahan dan/atau bantuan serta fasilitasi pembiayaan perumahan	15%

Program :

1 Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

BA. 033.08

BA. 999.03

BA. 999.07

Anggaran


Rp. 263.775.018.000

Rp. 9.000.000.000.000

Rp. 4.469.192.278.000


JAKARTA, JANUARI 2020

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



M. BASUKI HADIMULJONO

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**



EKO D. HERIPOERWANTO

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau		
IKSS: Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	56,10%	56,86%
SP Meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman		
1. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	71,44%	100%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	50,40%	72,39%
SP Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	50,40%	55,92
IKSS: Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100%
SP Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
1. Tingkat ketersediaan KPB infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100%

Program:


- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - BA. 033
 - BA. 999.03
 - BA. 999.07
- Program Dukungan Manajemen
 - BA. 033
 - BA. 999.99

Anggaran
 Rp15.143.076.305.000
 Rp421.094.006.000
 Rp9.000.000.000.000
 Rp5.721.982.299.000
 Rp481.315.695.000
 Rp222.515.695.000
 Rp258.800.000.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


M. BASUKI HADIMULJONO

JAKARTA, OKTOBER 2020
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN


EKO D. HERIPOERWANTO

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

2.3. METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran digunakan untuk menghitung capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Secara detail metode pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	2. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK 01	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen dan BLU PPDPP)	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip (%) 2. Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan (%) 3. Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran (%) 4. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (15%): <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip yang disusun dibandingkan dengan target (10%) • Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan yang disusun dibandingkan dengan target (10%) • Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Pengolahan Data dan Komunikasi (%) 5. Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (%) 6. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 7. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor (%) 8. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%) Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%) 		
		2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum (%) 2. Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama (%) 3. Pelaksanaan	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 2 (15%): <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum yang disusun dibandingkan dengan target (30%) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama yang disusun dibandingkan dengan target (20%) 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (%)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 		
		3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi (%) Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 3 (10%): <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%) Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%) Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) 		
		4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (%) Laporan Kinerja yang disusun (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 4 (10%) <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dibandingkan dengan target (50%) Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun (%) 2. Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 5 (15%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 		
		6. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat (%) 2. Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 6 (10%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 		
		7. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 7 (10%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP (10%)	Fasilitas Perkantoran (%) 2. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%)	1. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (50%)		
		8. Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 2. Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (%) 3. Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 8 (15%) 1. Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (30%) 3. Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (30%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SS2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	<p>Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif</p> <p>IKSS, merupakan nilai komposit dari indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 	<p>IKSS, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (30%)</p> <p>Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target.</p> <p>Indikator 2 (70%)</p> <p>Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.</p>		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SP 01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%) 	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indicator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) <ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. 		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		
SK 02	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) <ul style="list-style-type: none"> Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Jumlah Dokumen Pengelolaan Data 		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Indikator 2 (30%) <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB		
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air: 1. Tingkat implementasi	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sbb: Indikator 1 (50%)		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		
	3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		Internal dan Eksternal	
	4. Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan:	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Perumahan sbb:		Internal dan Eksternal	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SS	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	1. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni (IKSS 02)	IKSS 02, merupakan indikator Tunggal dalam bentuk prosentase (%)	Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50% IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi hasil perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%). Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut:		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				$A = Y + \left[\left(\frac{\sum(V+W)}{11.000.000} \right) * 100 \right] * \{X - Y\}$ <p>Keterangan:</p> <p>A: Capaian Kinerja (%)</p> <p>V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit)</p> <p>W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit)</p> <p>X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%)</p> <p>Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)</p>		
SP 01	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	1. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	IKSP1, merupakan indikator Tunggal dalam bentuk prosentase (%)	IKSP1, dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitas pembiayaan perumahan dibandingkan dengan target		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%) 2. Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%) 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <p>Indikator 1 (30%)</p> <p>Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target.</p> <p>Indikator 2 (50%)</p> <p>Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target.</p> <p>Indikator 3 (20%)</p> <p>Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target.</p>		Internal dan eksternal (Bank, PT SMF dan BP Tapera)
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan 	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: <p>Indikator 1 (50%)</p> <p>Jumlah Fasilitas Penyaluran FLPP yang</p>		Internal dan Eksternal (Bank)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Pembiayaan Perumahan	<p>promosi, kerjasama dan verifikasi (%)</p> <p>2. Prosentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja (%)</p> <p>3. Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya (%)</p>	<p>dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan verifikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.</p> <p>Indikator 2 (25%)</p> <p>Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang direkonsiliasi dibandingkan dengan target.</p> <p>Indikator 3 (25%)</p> <p>Jumlah kegiatan dukungan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.</p>		

2.4. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Target Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Adapun target pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SS. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau		
IKSS. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	56,10%	56,86%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	71,44%	100,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSS. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	50,40%	72,39%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	50,40%	55,92%
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100%

Pencapaian target di atas didukung oleh kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Target pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah target setiap Unit Kerja Eselon II yang ada di bawah

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan PPDPP. Adapun target pencapaian indikator kinerja kegiatan masing-masing Unit Eselon II adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tabel 2.2 Target Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,5%	13,5%
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Tabel 2.3 Target Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	85%	100%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tabel 2.4 Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	0%	25%
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tabel 2.5 Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	25%
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tabel 2.6 Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	8,33%	25%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%

f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tabel 2.7 Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	0%	25%
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42%	50%
3	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%

g. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Tabel 2.8 Target Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target
1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memenuhi Kebutuhan Tugas Teknis PPDPP	10%	10%
2	Tingkat Pemenuhan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Teknis PPDPP	15%	15%
3	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	50%

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI



BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam upaya pembangunan suatu organisasi yang berkesinambungan, Sumber Daya Manusia mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pencapaian tujuan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi. Suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam atau aparatur organisasi tersebut.

Rincian sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Eselon II

No	Unit Kerja	PNS	Non PNS		Jumlah
			Substansi	Pendukung	
1	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	54	20	61	135
2	Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	23	24	9	56
3	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	19	12	8	39
4	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	21	15	10	46

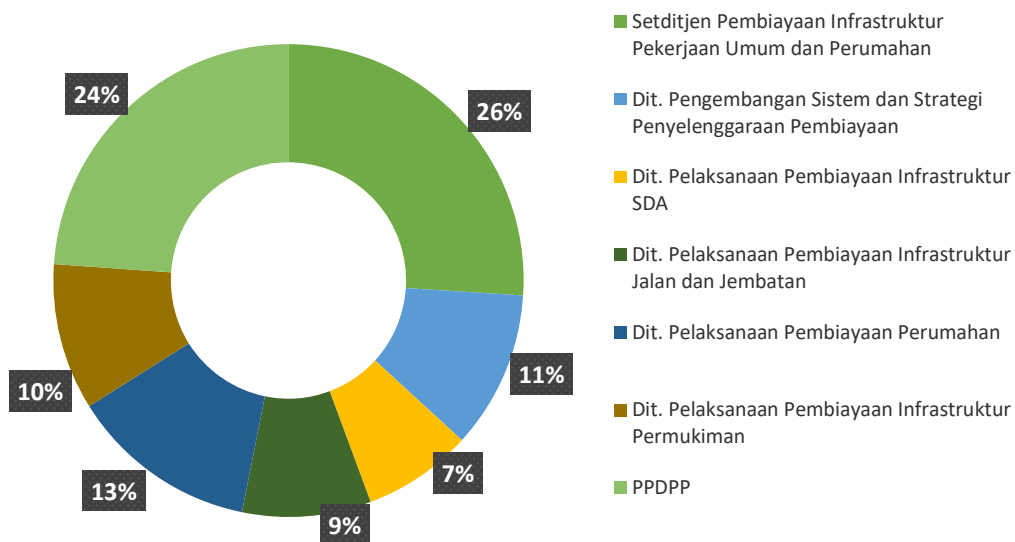
No	Unit Kerja	PNS	Non PNS		Jumlah
			Substansi	Pendukung	
5	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	27	32	8	67
6	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	22	19	11	52
7	PPDPP	20	83	21	124
TOTAL		186	205	128	519

Sumber: Laporan Kinerja Eselon II dan PPDPP

Keterangan:

Substansi = Konsultan Individu

Pendukung = Pegawai Honorer



Gambar 3.1 Persentase SDM per unit kerja Eselon II

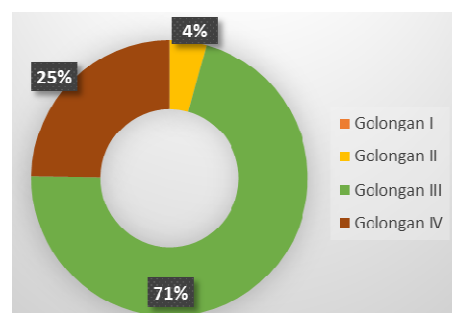
Tabel 3.2

Jumlah PNS Menurut Golongan

No.	Menurut Golongan	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	8
3	Golongan III	132
4	Golongan IV	46
TOTAL		186

Gambar 3.2

Persentase PNS Menurut Golongan

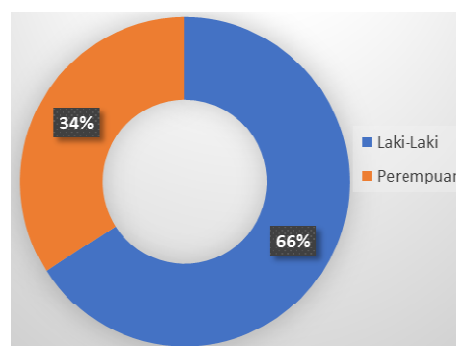
**Tabel 3.3**

Jumlah SDM Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah
Laki-Laki	104	238	342
Perempuan	82	95	177
TOTAL	186	333	519

Gambar 3.3

Persentase SDM Menurut Jenis Kelamin

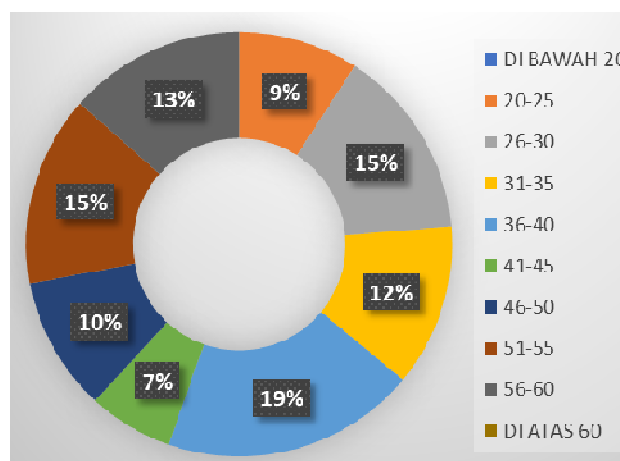
**Tabel 3.4**

Jumlah PNS Menurut Usia

No	Menurut Usia	Jumlah
1	Di Bawah 20	0
2	20-25	17
3	26-30	27
4	31-35	23
5	36-40	36
6	41-45	12
7	46-50	19
8	51-55	27
9	56-60	25
10	DI ATAS 60	0
TOTAL		186

Gambar 3.4

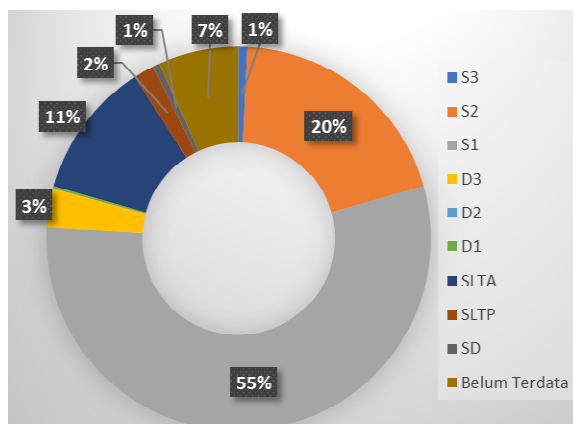
Persentase PNS Menurut Usia



Tabel 3.5
Jumlah SDM Menurut Pendidikan

No	Menurut Jenjang Pendidikan	PNS	Non Pns	Jumlah
1	S3	4	0	4
2	S2	73	30	103
3	S1	97	190	287
4	D3	1	16	17
5	D2	0	0	0
6	D1	1	0	1
7	SLTA	10	50	60
8	SLTP	0	9	9
9	SD	0	3	3
	Belum Terdata	0	35	35
TOTAL		186	333	519

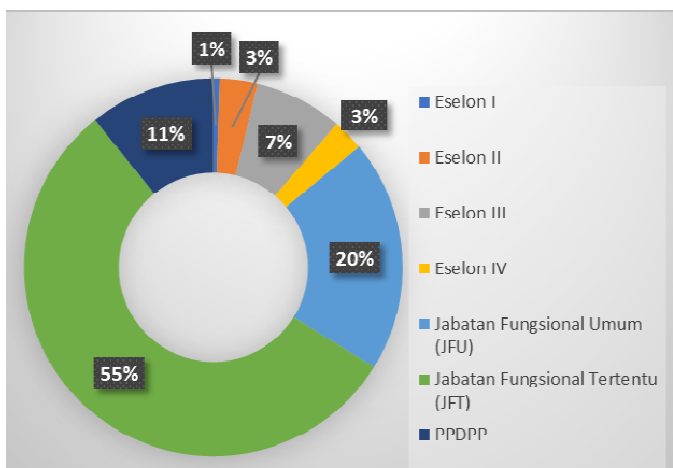
Gambar 3.5
Persentase SDM Menurut Pendidikan



Tabel 3.6
Jumlah PNS Menurut Jabatan

No.	Menurut Jabatan	Jumlah
1	Eselon I	1
2	Eselon II	6
3	Eselon III	14
4	Eselon IV	5
5	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	37
6	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	103
7	PPDPP	20
TOTAL		186

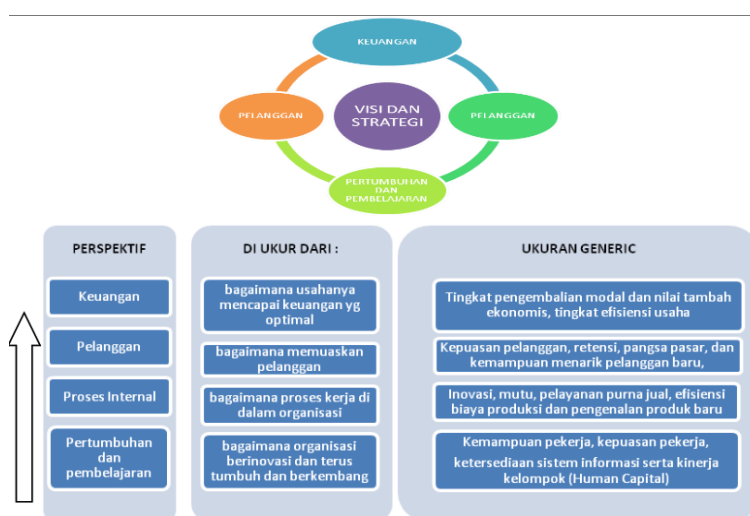
Gambar 3.6
Persentase PNS Menurut Jabatan



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur paling utama dalam mencapai tujuan kinerja suatu organisasi. Saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 186 orang. Jumlah tersebut termasuk 4 orang PNS dari Kementerian Keuangan yang diperbantukan untuk Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Pengukuran kinerja PNS menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun oleh masing-masing PNS secara berjenjang dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Jabatan Fungsional.

Dalam mendukung tercapainya kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan juga dibantu oleh pegawai non-PNS sebanyak 333 orang yang terdiri dari Konsultan Individu (KI) sebanyak 205 dan tenaga pendukung sebanyak 128, sehingga total SDM pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan pada tahun 2020 sebanyak 519 orang.

Salah satu metode pengukuran kinerja terintegrasi adalah metode *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat perspektif tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain. Hubungan antara keempat perspektif digambarkan sebagai suatu kesatuan sebagaimana digambarkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3.7 Hubungan empat perspektif *Balanced Scorecard*

Indikator Kinerja Individu diukur menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dalam kegiatan pengumpulan dan merekap SKP seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi langsung mulai dari inputting hingga pada penilaian SKP di akhir tahun. Sistem aplikasi tersebut mempermudah dalam penghitungan sekaligus menjadi database kinerja setiap individu di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga pelaksanaan monitoring kinerja individu dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih singkat.

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL																	
Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2020																	
NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP				
			Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Meningkatnya presentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas dan bantuan pembiayaan perumahan	0	100	Persentase	100	12	Bulan	-	0	100	Persentase	90	12	Bulan	-	266,00	88,67
2	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	0	55,92	Persentase	100	12	Bulan	-	0	55,92	Persentase	90	12	Bulan	-	266,00	88,67
3	Meningkatnya ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	0	100	Persentase	100	12	Bulan	-	0	100	Persentase	90	12	Bulan	-	266,00	88,67
II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG :																	
2	(kreatifitas)																
	(kreatifitas)																
Nilai Capaian SKP																88,67	
																(Baik)	

Jakarta, Desember 2020

Pejabat Penilai,



Dr. Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc.

Jakarta, Desember 2020
Pejabat Penilai,

Dr. Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc.

Gambar 3.8 SKP Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melakukan upaya-upaya antara lain melalui:

1. Pelaksanaan *capacity building* Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.
2. Pelatihan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Bidang Pembiayaan Infrastruktur

4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur
5. Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan dan Keprotokolan
6. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengikut sertakan dalam pertemuan atau seminar/*workshop/short course* (pendidikan/pelatihan singkat).

Dengan ditingkatkannya kemampuan sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi pegawai, diharapkan akan memberikan motivasi dan semangat kerja untuk meningkatkan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3.2. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas kerja yang merupakan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai. Faktor yang diperhitungkan untuk meningkatkan semangat kerja pegawai adalah fasilitas kerja yang memadai dan dapat membantu pegawai dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini cukup beralasan sebab fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen sarana dan prasarana suatu organisasi dalam mendukung proses berjalannya suatu organisasi.

Sistem penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh telah mengalami perubahan baik di pusat maupun di daerah dengan berbasis kinerja, tingkat capaian yang berdasarkan pada kinerja serta pelayanan yang prima, untuk mencapai keberhasilan kinerja yang baik pegawai pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi, sarana dan prasarana jika tidak disiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi akan mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu proses manajemen sarana dan prasarana agar lebih menjamin bahwa unit kerja

ini telah tersedia sarana dan prasarana yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung berbagai kegiatan, tugas dan fungsi yang sesuai, cepat, tepat dan bermanfaat. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja pasal 3 yang menjelaskan tentang penataan sarana dan prasarana kerja, antara lain:

- Kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan;
- Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- Memudahkan sistem komunikasi;
- Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Untuk menyikapi hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun 2020 ini, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sedang melakukan penataan ruang kerja guna mendukung sarana dan prasarana untuk proses kelancaran pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri tersebut di atas. Adapun sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Daftar Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah
1	Pompa Air	1
2	Jeep	3
3	Station Wagon	17
4	Sepeda Motor	8
5	Lemari Besi/Metal	111
6	Lemari Kayu	13
7	Rak Besi	121
8	Rak Kayu	2
9	Filing Kabinet Besi	99

No	Nama Barang	Jumlah
10	Locker	4
11	Laci Box	2
12	Camera Control Television System (CCTV)	8
13	Alat Penghancur Kertas	53
14	White Board Electronic	3
15	Laser Pointer	7
16	LCD Projector/Infocus	18
17	Softboard	1
18	Acces Control System	10
19	Pintu Elektrik	14
20	Focusing Screen/Layar LCD Projector	12
21	Meja Kerja Kayu	322
22	Kursi Besi/Metal	203
23	Meja Rapat	37
24	Meja Komputer	1
25	Meja Resepsionis	5
26	Meja Makan Kayu	12
27	Kursi Fiber Glas/Plastik	613
28	Nakas	10
29	Cubikal	269
30	Mesin Cuci	1
31	Air Cleaner	17
32	Lemari Es	5
33	AC Sentral	46
34	AC Split	66
35	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2
36	Kipas Angin	2
37	EXhause Fan	10
38	Oven Listrik	1
39	Kitchen Set	5
40	Televisi	38
41	Sound System	1
42	Wireless	1
43	Mic Conference	1
44	Unit Power Supply	2
45	Camera Video	2
46	Dispenser	4
47	Handy Cam	1
48	Heater	2
49	Voice Recorder	10
50	Tripod Camera	2
51	Lensa Camera	8
52	Camera Adaptor	1
53	Camera Digital	19

No	Nama Barang	Jumlah
54	Lampu Blitz Kamera	1
55	Camera Conference	9
56	Mesin Jilid	2
57	Mesin Barcode	16
58	Telephone	1
59	Handy Talky	20
60	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1
61	Unit Remote Control	6
62	Electrik Thermometer	5
63	Mini Komputer	5
64	P.C Unit	254
65	Note Book	64
66	Tablet PC	24
67	Auto Switch/Data Switch	1
68	Monitor	4
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	232
70	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	48
71	Server	2
72	Router	2
73	Rak Server	2
74	Firewall	1
75	Switch	8
76	Acces Point	15
77	Network Cable Tester	1

Sumber: Data Simak BMN Ditjen. Pembiayaan Perumahan Tahun 2020

3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) BA. 033 dan BA. 999 yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024.

1. BA. 033

Alokasi awal Pagu Anggaran BA. 033 adalah sebesar Rp263.775.018.000,00 yang terdiri dari:

- Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan sebesar Rp191.821.494.000,00 dengan nomor: SP DIPA-033.16.1.631003/2020;

- Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp71.953.524.000,00 dengan nomor : SP DIPA- 033.16.1.631021/2020.

Seiring dengan berjalannya Tahun Anggaran 2020 BA. 033 mengalami beberapa revisi, diantaranya:

- Revisi DIPA pertama terbit pada tanggal 20 Februari 2020, pada revisi pertama dilakukan perubahan KPPN untuk PHLN, dari KPPN Jakarta V ke KPPN khusus pinjaman dan hibah;
- Revisi DIPA kedua terbit pada tanggal 27 April 2020, revisi ini dimaksudkan untuk penanganan pandemi *Covid 19*, pada revisi kedua BA.033 mengalami pemotongan sebesar Rp25.000.000.000,00 sehingga pagu anggaran BA.033 menjadi Rp238.775.018.000,00;
- Revisi DIPA ketiga terbit pada 11 Juni 2020, revisi ini ada penambahan alokasi anggaran untuk penyaluran BP2BT sebesar Rp404.834.683.000,00 untuk menyalurkan 9.500 unit rumah, sehingga pagu anggaran BA.033 menjadi Rp643.609.701.000,00;
- Revisi DIPA keempat terbit pada 16 Juli 2020;
- Revisi DIPA kelima terbit pada tanggal 25 Agustus 2020; dan
- Revisi DIPA keenam terbit pada tanggal 18 November 2020.

Dengan adanya revisi DIPA akibat dari penyesuaian kegiatan di atas, maka total pagu anggaran BA. 033 untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp643.609.701.000,00 yang terdiri dari:

- Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp571.656.177.000,00; dan
- Satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebesar Rp71.953.524.000,00.

2. BA. 999.03

Anggaran ini dikelola oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk

menyalurkan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total pagu anggaran sebesar Rp9.000.000.000.000,00 dengan Nomor: SP DIPA- 999.03.1.984532/2020. Selain menggunakan anggaran APBN, dalam penyaluran FLPP juga menggunakan pengembalian pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,00.

3. BA. 999.07

Anggaran ini dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Total pagu anggaran sebesar Rp4.469.192.278.000,00 dengan Nomor: SP DIPA- 999.07.1.987252/2020. Anggaran ini untuk menyalurkan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp3.869.192.278.000,00 dan untuk program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp600.000.000.000,00.

Pada tanggal 8 Mei 2020, BA. 999.07 mengalami revisi pertama karena ada pergantian Kuasa Pengguna Anggaran serta penambahan alokasi anggaran. Pagu anggaran bertambah sebesar Rp1.252.790.021.000,00 sehingga total anggaran BA. 999.07 menjadi Rp5.721.982.299.000,00. Dari total anggaran tersebut, Rp4.657.982.299.000,00 untuk penyaluran Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Rp1.064.000.000.000,00 untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)

4. BA. 999.99

Anggaran ini dikelola oleh Satuan Kerja Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum. Total anggaran sebesar Rp258.800.000.000,00 dengan nomor DIPA SP DIPA- 999.99.1.978010/2020.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. CAPAIAN KINERJA

Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode RPJMN 2020-2024. Pada tahun ini terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adanya peraturan tersebut maka di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ada perubahan nomenklatur pada unit kerja Eselon II. Adapun perubahan pada Unit Kerja Eselon II adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perubahan Nama Unit Kerja Eselon II

Permen PUPR No. 03/PRT/M/2019	Permen PUPR No. 13 Tahun 2020
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan
Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Selain itu, pada tahun 2020 juga terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan akan mengampu 2 program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen (Koordinator: Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR); dan (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator: Direktorat Jenderal Cipta Karya). Dua Program tersebut merupakan program yang digunakan DJPI dalam rangka mencapai tujuan Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut di-*breakdown* menjadi Sasaran Program. Sasaran Program (SP) DJPI yaitu:

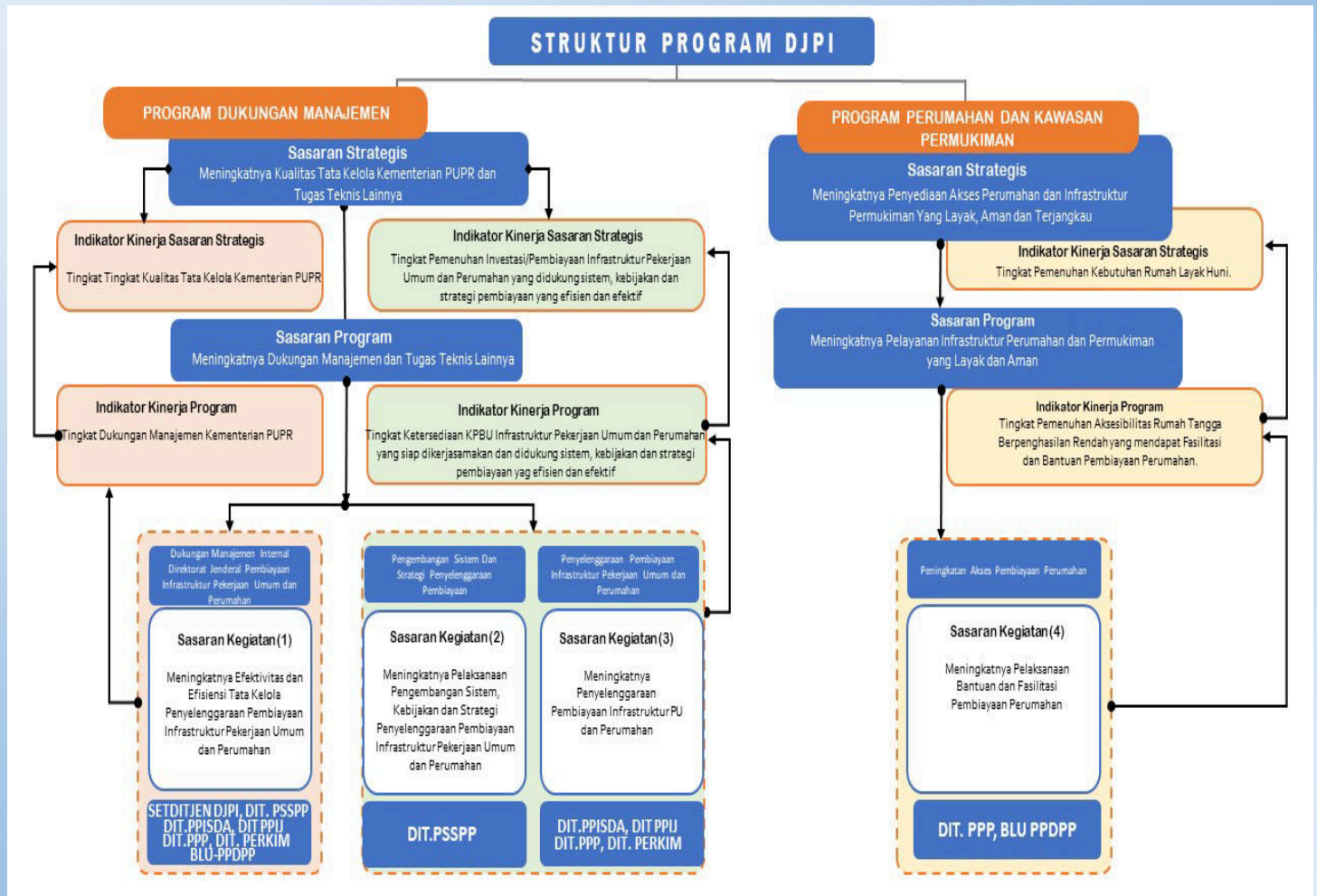
- 1) **Sasaran Program** Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya.

Indikator Kinerja Program terdiri dari dua indikator yaitu:

- a. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR), diampu oleh Sekretariat DJPI, BLU PPDPP dan Direktorat di lingkungan DJPI.
 - b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan.
- 2) **Sasaran Program** Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman. **Indikator Kinerja Program** tersebut mencakup Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Untuk mendukung Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap Unit Kerja di lingkungan DJPI berkontribusi terhadap capaian Sasaran Program melalui Sasaran

Kegiatan (SK) Unit Kerja. Adapun Peta Strategis DJPI untuk (1) Program Dukungan Manajemen serta (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Dari peta strategis di atas selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sehingga capaian kinerja dua Sasaran Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dapat diukur. Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
(1)	(2)	(3)	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SS. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau			
IKSS. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	56,86%	56,66%	99,65%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00%	70,88%	70,88%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	72,39%	79,2%	109,41%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,92%	55,50%	99,25%
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	116,88%	116,88%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	98,93%	98,93%

Keterangan: Target kinerja berdasarkan Renstra 2020-2024

Tabel di atas merupakan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2020.

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 70,88% dari target 100%, sehingga pada IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan kinerjanya sebesar **70,88%**. Dari capaian tersebut, bersama Direktorat Jenderal

Perumahan mendukung indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni sehingga diperoleh capaian **56,66%** dan kinerja **99,65%**. IKSS Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni merupakan indikator yang mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian PUPR yaitu Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.

Untuk program dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program (IKSP), yaitu: 1) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dengan capaian sebesar 55,50% dari target 55,92% sehingga kinerjanya sebesar **99,25%**. 2) Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian kinerja sebesar 98,93% dari target 100,00% sehingga kinerjanya sebesar **98,93%**.

Pada program dukungan manajemen, untuk IKSP 1 mendukung indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR yang perhitungannya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan diperoleh capaian sebesar **79,2%** dan kinerjanya **109,41%**. Untuk capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif memiliki capaian sebesar 116,88% dari target 100% sehingga kinerjanya sebesar **116,88%**. IKSS Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif merupakan indikator yang mendukung tercapainya sasaran strategis kementerian PUPR yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Metode perhitungan atas capaian kinerja di atas terlampir. Untuk capaian Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

4.1.1. Capaian Indikator Kinerja Program

A. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program perumahan dan Kawasan permukiman merupakan program yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman, dan Terjangkau, dengan Indikator kinerja sasaran strategis Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni. Untuk memenuhi indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berkontribusi dengan Direktorat Jenderal Perumahan. Selanjutnya capaian Indikator kinerja sasaran strategis tersebut akan dihitung kembali dengan capaian Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman, dan Terjangkau.



Gambar 4.2 Perumahan Subsidi

Capaian indikator kinerja sasaran program Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 70,88%. Perhitungan capaian indikator kinerja sasaran program adalah total realisasi FLPP, SSB, BP2BT, dan Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (SMF) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan.

Pada tahun 2020, realisasi untuk FLPP adalah sebesar 109.253 unit, SSB sebesar 90.362 unit, BP2BT sebesar 1.357 unit dan Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (SMF) sebesar 8.460 unit sehingga total realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan sebesar 209.432 unit. Secara detail realisasi dari masing-masing program bantuan pembiayaan perumahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN	UNIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Rp9.000.000.000.000,00	102.500	Rp11.231.193.635.691,00	109.253
2	Subsidi Selisih Bunga (SSA/SSB)	Rp3.869.192.278.000,00	175.000	*) Rp2.868.577.697.529,00	90.362
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) **	Rp1.064.000.000.000,00	263.000	Rp526.376.000.000,00	130.264
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	Rp380.000.000.000,00	9.500	Rp53.864.000.000,00	1.357
5	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (SMF)	Rp521.172.000,00	8.460	Rp489.694.000,00	8.460
TOTAL		Rp13.249.713.450.000,00	295.460	Rp14.154.125.027.220,00	209.432

Keterangan : *) Realisasi keuangan SSB termasuk pembayaran SSB menggulung

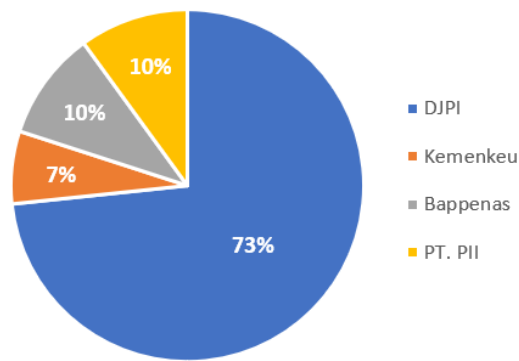
**) SBUM tidak termasuk perhitungan total realisasi bantuan pembiayaan perumahan

B. Program Dukungan Manajemen

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam mendukung Program Dukungan Manajemen memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: 1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR; dan 2. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Dari 2 (dua) IKSS tersebut masing-masing memiliki 1 (satu) Sasaran Program yang selanjutnya diuraikan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: 1. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR; dan 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Capaian kinerja untuk IKSP 1 dihitung dari sasaran kegiatan Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen dan BLU PPDPP). Setelah dilakukan perhitungan tersebut diperoleh realisasi sebesar 50,50% dari target 55,92% sehingga capaian kinerjanya 99,25%. IKSP ini mendukung capaian IKSS Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR yang perhitungannya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Untuk capaian kinerja untuk IKSP 2 dihitung dari pembobotan dihitung dari pembobotan antara jumlah proyek KPBU yang sudah siap lelang (sudah FBC final) dan Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Total responden yang dilakukan survey sebanyak 30 orang perwakilan dari internal Direktorat Jenderal Pembiayaan



Gambar 4.3 Persentase Responden Survey

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan dari eksternal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Bappenas dan PT. PII. Hasil dari survey

menunjukkan Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 67,50%. Setelah dilakukan perhitungan dengan jumlah proyek KPBU yang sudah siap lelang (sudah FBC final) maka diperoleh nilai capaian kinerja untuk IKSP 2 adalah sebesar 98,93%.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya memiliki IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Perhitungan IKSS ini dari pembobotan nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman, dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dan Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Jumlah responden dan metode suvey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sama dengan suvey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hasil survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 67,50%.

Dengan metode perhitungan tersebut diperoleh nilai capaian kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah 116,88%. Jumlah proyek dan nilai investasi KPBU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Proyek dan Nilai Investasi KPBU yang Sudah Siap Lelang

NO	SEKTOR	TARGET RENSTRA TA. 2020		REALISASI**		
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sumber Daya Air	1	Rp4.787.000.000.000,00	0	-	0
2.	Jalan dan Jembatan	4	Rp41.706.500.000.000,00	6	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau; • Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci; • Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF); • Jalan Tol Semarang Harbour; • Penggantian Dan/Atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa; • Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi 	Rp63.481.300.000.000,00
3.	Perumahan	1	Rp1.100.000.000.000,00	0	-	0
4.	Permukiman	3	Rp6.597.125.614.184,00	3	<ul style="list-style-type: none"> • SPAM Regional Jatiluhur I; • SPAM Karian Serpong; • SPAM Kota Pekanbaru 	Rp4.607.737.499.380,00
TOTAL		9	Rp54.190.625.614.184,00	9		Rp68.089.037.499.380,00

Keterangan **: Termasuk proyek yang sudah FBC Final

4.1.2. Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II

Dalam mendukung tercapainya Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II dan 1 (satu) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Adapun capaian kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon II dan PPDPP adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pada tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung dalam tercapainya Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung Indikator Kinerja Sasaran (IKSS) Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Adapun indikator kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut:

- Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
- Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik.

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,5%	13,50%	100%
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%	100%
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%	100%
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%	100%
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	14,25%	95%
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%	100%

Sumber Data: Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020

B. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Setelah terbit Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi berubah menjadi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Dalam mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan survey tentang Tingkat Kualitas dan Penerapan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hasil survey kepada 30 responden menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, meskipun masih dibawah target yang ditetapkan. Mengingat tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam periode Renstra 2020-2024, maka target capaian survey cukup 70%. Untuk kedepannya target akan terus ditingkatkan dan diharapkan capaian Tingkat Kualitas dan Penerapan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan semakin meningkat. Hasil dari survey ini untuk melihat outcome dari pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan. Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	98,13%	98,13
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%	100%

Sumber Data: Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2020

C. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Kinerja dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Pada tahun 2020 target proyek KPBU bidang SDA yang siap lelang adalah 1 proyek. Namun, target tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun 2020. Berikut adalah progress proyek KPBU bidang SDA tahun 2020:

Tabel 4.7 Proyek KPBU Bidang SDA

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Kegiatan Proyek
Tahap Penyiapan				
<i>Solicited</i>				
1	Bendungan Pasir Kopo	Banten	2,37	<i>Outline Business</i>

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Kegiatan Proyek
2	Bendungan Matenggeng	Jawa Tengah	3,63	Case (OBC)
3	Bendungan Bodri	Jawa Tengah	2,05	
4	SPAB Sidan	Bali	0,614	
5	SPAB Karian Barat	Banten	0,743	
6	Bendungan Merangin	Jambi	6,084	Final Business Case (FBC)
Unsolicited				
1	Proyek PLTM Bendungan Bintang Bano + OP Bendungan	NTB	15,656	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen FS

Sumber Data: Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2020

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KPBU bidang SDA adalah sebagai berikut:

- Proses Permohonan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*/PDF) proyek Bendungan Merangin ke Kementerian Keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menghambat proses transaksi KPBU Sumber Daya Air.
- Belum adanya PP turunan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Tabel 4.8 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%	24,56%	98,24%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%	100%

Sumber Data: Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2020

D. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Jalan dan Jembatan

Kinerja dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PPIJJ) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Pada tahun 2020 target proyek KPBU bidang Jalan dan Jembatan yang siap lelang adalah 4 (empat) proyek. Dari target 4 (empat) proyek KPBU yang siap lelang, yang berhasil direalisasikan adalah 6 proyek. Berikut adalah progres 6 (enam) proyek KPBU bidang Jalan dan Jembatan yang siap lelang tahun 2020:

Tabel 4.9 Daftar Proyek KPBU Bidang Jalan dan Jembatan yang Siap Lelang

No.	Nama Proyek	Biaya Investasi
1	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau	585.300.000.000
2	Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci	26.150.000.000.000
3	Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis <i>Multi Lane Free Flow</i> (MLFF)	2.920.000.000.000
4	Jalan Tol Semarang <i>Harbour</i>	12.130.000.000.000

5	Penggantian Dan/Atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa	2.336.000.000.000
6	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	19.360.000.000.000
TOTAL		63.481.300.000.000

Sumber Data: Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA. 2020

Adanya realisasi yang melampaui target yang terjadi pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendorong proses penyiapan 2 (dua) proyek KPBU yaitu Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa, yang telah masuk ke dalam *PPP book*; dan
2. Adanya upaya untuk mempercepat kajian dokumen *Feasibility Study* (FS) pada semua proyek KPBU yang menjadi target tahun 2020.

Secara keseluruhan, selama tahun 2020 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mengawal proyek-proyek KPBU sebagai berikut:

Tabel 4.10 Daftar Proyek KPBU Bidang Jalan dan Jembatan
(*Solicited*)

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Proyek
Tahap Penyiapan				
1	Jalan Tol Jember-Lumajang	Jawa Timur	8,02	<i>Outline Business Case (OBC)</i>
2	Jalan Tol Batulicin-Tanah Grogot	Kalimantan Selatan	33,90	
3	Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta	Jawa Tengah	25,06	
4	Jalan Tol Jember-Banyuwangi	Jawa Timur	19,59	
5	Jalan Tol Tanah Grogot-Penajam	Kalimantan Timur	16,80	

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Triliun)	Status Proyek
6	Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Babat	Jawa Timur	14,67	Outline Business Case (OBC)
7	Jalan Tol Jember - Situbondo	Jawa Timur	10,50	
8	Jalan Tol Tulungagung - Kepanjen	Jawa Timur	9,90	
9	Jalan Tol Samarinda - Bontang	Kalimantan Timur	9,60	
10	Jalan Tol Demak - Tuban	Jawa Tengah	23,85	
11	Jembatan Bitung-Lembeh	Sulawesi Utara	1,26	
12	Jembatan Muna-Buton	Sulawesi Tenggara	2,80	
13	OM Jembatan Suramadu (<i>Bundling</i> dengan SERR)	Jawa Timur	4,322	
14	Jembatan Ternate-Tidore (Pembangunan)	Maluku Utara	1,89	
15	Jembatan Tanah Bumbu - Pulau Laut	Kalimantan Selatan	2,83	
16	Jalan Tol Mamminasata	Sulawesi Selatan	9,87	Final Business Case (FBC)
17	Jembatan Batam-Bintan	Kepulauan Riau	8,62	
Tahap Transaksi				
18	Preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Riau	Riau	0,585	Request for Proposal (RfP)
19	Jalan Tol Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	23,79	Financial Close (FC)
20	Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	DI. Yogyakarta	17,38	
21	Jalan Tol Binjai-Langsa	Aceh - Sumatera Utara	23,35	
22	Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak	Jawa Timur	11,11	
23	Jalan Tol Sp Indralaya-Muara Enim	Sumatera Selatan	24,11	
24	Preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	0,916	

Tabel 4.11 Daftar Proyek KPBU Bidang Jalan dan Jembatan
(Unsolicited)

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi (Rp Triliun)	Status Proyek
Tahap Perencanaan				
1	Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari)	Banten	5,64	Penyampaian Usulan Prakarsa dan Penyusunan Dokumen PraFS
2	Jalan Tol Pasar Jumat - Parung	Jawa Barat - DKI Jakarta	5,30	
3	Jalan Tol Kediri-Tulungagung	Jawa Timur	8,55	
4	Jalan Tol Cipularang - Lembang	Jawa Barat	5,29	
5	Jalan Tol Layang Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR)	Jawa Barat	9	
6	Revitalisasi Simpang Sebidang Jalur Kereta Api Jakarta-Surabaya			Proses Persetujuan Prakarsa Awal
7	Jalan Tol Mojokerto - Mojosari - Gempol	Jawa Timur	6,30	
8	Jalan Tol Juanda - Gempol	Jawa Timur	10,01	
9	Jalan Tol Cileles (Serpong) - Maja - Rangkas Bitung - Merak	Banten	24,45	
10	Jalan Tol Wisata Sukorejo - Batu - Kediri	Jawa Timur	27,27	

Jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, berikut adalah capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Tabel 4.12 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	25%	100%
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%	100%

Sumber Data: Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA. 2020

E. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Kinerja dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Dit. PPP) mendukung Program Dukungan Manajemen dan program perumahan dan kawasan permukiman. Dalam mendukung program dukungan manajemen, Dit. PPP memiliki Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan Investasi Pembiayaan Perumahan.

Dalam Renstra 2020-2024, target proyek KPBU bidang perumahan tahun 2020 adalah 1 proyek yang siap lelang. Namun, target tersebut belum dapat direalisasikan.

Pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) proyek KPBU Bidang Perumahan dalam tahap penyediaan dengan total biaya investasi Rp2,65 T yang terdiri dari 3 (tiga) proyek Rumah susun. Detail progres proyek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan

No	Nama Proyek	Lokasi	Biaya Investasi	Progres
Tahap Penyiapan				
1	Rumah Susun Paldam Siliwangi	Bandung	414 M	Penyusunan <i>Outline Business Case</i> (OBC)
2	Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan	Bandung	1,10 T	
3	Rumah Susun Terintegrasi KEK SEI Mangkei	Sumatera Utara	1,13 T	

Sumber Data: Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2020

Isu/permasalahan yang dihadapi pada proses pelaksanaan proyek KPBU Bidang Perumahan adalah sebagai berikut:

- Pengajuan PDF oleh Walikota Bandung Pu.01.02/756.DPKP3/III/2020 bertanggal 2 Maret 2020 perihal Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU Rumah Susun Paldam Bandung yang ditujukan untuk Menteri Keuangan ditolak. Adapun tindak lanjut dari isu tersebut adalah Perbaikan dokumen FBC dan proses tahapan dari FBC kembali menjadi OBC karena perbaikan tersebut.
- Penentuan kriteria desain bangunan sesuai dengan kondisi lahan lintasan Sungai Citarum yang dilakukan oleh konsultan arsitektur. Adapun tindak lanjut dari isu ini adalah Koordinasi dengan BBWS Citarum terkait lokasi lahan yang dilalui oleh Sungai Citarum agar selaras dengan kondisi lahan.
- Penyediaan air bersih untuk Rumah Susun Cisaranten belum teratasi, adapun tindak lanjut dari isu ini adalah Mencari alternatif solusi penyediaan air bersih untuk area Rumah Susun Cisaranten.

- Perencanaan Pembuangan Sampah dan Limbah Rumah Susun KPBU Cisaranten adapun tindak lanjut dari isu Perlu dipecahkan dalam perencanaan teknis Rumah Rusun KPBU Cisaranten agar tidak menjadi masalah lingkungan kedepannya.
- Kemenkeu sudah memberikan hasil revidi permohonan PDF yang diajukan Pemprov Sumut. Hal-hal yang harus diperbaiki/ditambahkan pada dokumen DPP yaitu refocusing tujuan proyek pada penyediaan rumah bagi pekerja industri KEK di Sei Mangkei adapun tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Pemprov Sumut akan melakukan penyempurnaan kajian DPP.

Dalam mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dit. PPP memiliki Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Untuk pemenuhan indikator Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, Dit. PPP melaksanakan kegiatan berikut:

- Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka;
- Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT);
- Fasilitas Pembiayaan Perumahan: SMF

Pada tahun 2020, Subsidi Selisih Bunga memiliki target 175.000 unit rumah tercapai 90.362 unit rumah, BP2BT memiliki target 9.500 unit rumah tercapai 1.357 unit rumah, dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan: SMF memiliki target 8.460 unit rumah tercapai 8.460 unit rumah. Rendahnya capaian bantuan pembiayaan perumahan terjadi karena penurunan daya beli dan juga minat pasar terhadap perumahan yang

terdampak oleh Pandemi Covid-19. Detail progres bantuan pembiayaan perumahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Realisasi Bantuan Pembiayaan Perumahan

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN	UNIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Subsidi Selisih Bunga (SSA/SSB)	Rp4.657.982.299.000,00	175.000	*) Rp2.868.577.697.529,00	90.362
2	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)	Rp1.064.000.000.000,00	263.000	Rp526.696.000.000,00	130.264
3	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	Rp380.000.000.000,00	9.500	Rp53.864.000.000,00	1.357
4	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (SMF)	Rp521.172.000,00	8.460	Rp489.694.000,00	8.460

Sumber Data: Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2020

Jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, berikut adalah capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Tabel 4.15 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	24,25%	97%
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	42,06%	84,12%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
3	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%	100%

Sumber Data: Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2020

F. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Kinerja dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Dit. PPIP) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Pada tahun 2020 target proyek KPBU bidang Permukiman yang siap lelang adalah 3 proyek. Dari target 3 proyek KPBU yang siap lelang, Dit.PPIP berhasil mencapai target tersebut. Berikut adalah progres 3 proyek KPBU bidang Permukiman yang siap lelang tahun 2020:

Tabel 4.16 Proyek KPBU Bidang Permukiman

No.	Nama Proyek	Biaya Investasi
1	SPAM Regional Jatiluhur I	Rp1.675.127.000.000,00
2	SPAM Karian Serpong	Rp2.432.662.075.279,00
3	SPAM Kota Pekanbaru	Rp499.948.424.101,00
TOTAL		Rp4.607.737.499.380,00

Meskipun Dit. PPIP dapat mencapai target 3 proyek KPBU bidang Permukiman yang siap lelang pada tahun 2020, bukan berarti dalam mencapai hal tersebut tidak menemukan kendala, berikut beberapa kendala yang dihadapi:

- Jumlah SDM yang tersedia masih kurang untuk dapat mendukung banyaknya kegiatan yang dilaksanakan

sehingga masih dijumpai pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan lembur di luar jam kerja;

- Banyaknya peraturan tentang pengadaan badan usaha KPBU yang masih belum efektif, banyak celah, dan belum mengakomodasi dalam hal tahapan waktu pelaksanaan yang menyebabkan terhambatnya proses KPBU; dan
- Koordinasi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan proyek KPBU belum maksimal

Pada tahun 2020, Dit. PPIP juga memiliki tugas tambahan yaitu mengelola anggaran untuk Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum (BA. 999.99) dengan total anggaran sebesar Rp258.800.000.000,00. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi 100%. Jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, berikut adalah capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Tabel 4.17 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25%	25%	100%
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%	100%

Sumber Data: Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman TA. 2020

G. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)

Kinerja dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mendukung Program Dukungan Manajemen dan

program perumahan dan kawasan permukiman. Dalam mendukung program dukungan manajemen, PPDPP memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memenuhi Kebutuhan Tugas Teknis PPDPP; dan
- Tingkat Pemenuhan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Teknis PPDPP.

Dalam mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, PPDPP memiliki Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Untuk pemenuhan indikator Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, PPDPP melaksanakan kegiatan penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada tahun 2020, FLPP memiliki target untuk menyalurkan bantuan 102.500 unit rumah. Di akhir tahun 2020 realisasi penyaluran FLPP adalah 109.253 unit rumah. Sehingga capaian kinerja PPDPP dalam penyaluran FLPP adalah 106,59%. Tingginya realisasi KPR FLPP tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh PPDPP yaitu dengan percepatan turn over dana FLPP dan menambah porsi pembiayaan. Dalam rangka menurunkan porsi pembiayaan Pemerintah, dilakukan kerjasama untuk pemanfaatan/sinergi pembiayaan dana jangka panjang lain dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Berikut adalah capaian kinerja PPDPP berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020.

Tabel 4.18 Capaian Kinerja PPDPP

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memenuhi Kebutuhan Tugas Teknis PPDPP	10%	10%	100%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
2	Tingkat Pemenuhan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Teknis PPDPP	15%	15%	100%
3	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	55,75%	111,5%

Sumber Data: Laporan Kinerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan TA. 2020

4.2. PERBANDINGAN KINERJA

4.2.1. Perbandingan Capaian Sasaran Program

Perbandingan capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan antara tahun 2020 dengan baseline dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19 Perbandingan Capaian Kinerja DJPI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASLINE	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SS. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau				
IKSS. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	56,10%	56,86%	56,66%	99,65%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman				
Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	71,44%	100,00%	70,88%	70,88%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSS. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	50,40%	72,39%	79,2%	109,41%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	50,40%	55,92%	55,50%	99,25%
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100%	116,88%	116,88%

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE	TARGET	CAPAIAN	KINERJA
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100%	98,93%	98,93%

Sumber Data: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja TA. 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan sebesar **70,88%**. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan baseline tahun 2019 menurun **0,56%**. Hal ini disebabkan oleh realisasi SSB dan BP2BT yang cukup rendah karena:

- Menurunnya jumlah akad KPR / permintaan SSB dan SBUM karena kondisi ekonomi masyarakat terdampak Covid-19;
- Suku bunga sebagai acuan perhitungan Subsidi Bunga Kredit perumahan turun;
- Pengembang lebih mengutamakan program bantuan subsidi perumahan lainnya dibandingkan BP2BT karena persyaratan relatif lebih mudah;
- Pengembang memiliki kekhawatiran terhadap pencairan bantuan yang dinilai cukup besar dapat dicairkan tepat waktu; dan
- Bank pelaksana lebih selektif terhadap pemohon dengan pekerjaan yang terdampak Covid-19.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dengan baseline tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar **5,10%**. Baseline tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 50,40%, capaian pada tahun 2020 sebesar 55,50%.

Untuk capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif pada tahun 2020 sebesar **98,93%**. Capaian tersebut lebih tinggi 50,10% apabila dibandingkan dengan baseline yang ditetapkan yaitu 48,83%. Meningkatnya capaian ini karena proyek KPBU bidang Jalan dan Jembatan dari target 4 proyek yang siap lelang, dapat terpenuhi 6 proyek siap lelang. Adanya capaian yang melebihi target pada proyek KPBU bidang Jalan dan Jembatan karena:

- Mendorong proses penyiapan 2 (dua) proyek KPBU yaitu Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa, yang telah masuk ke dalam PPP book; dan
- Adanya upaya untuk mempercepat kajian dokumen *Feasibility Study* (FS) pada semua proyek KPBU yang menjadi target tahun 2020.

Perbandingan capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terhadap Renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20 Perbandingan Capaian Sasaran Program Terhadap Renstra Tahun 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
			2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN				
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)		
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		%	72,39	79,2%
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		%	55,92	55,50%
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		%	100	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:				
1	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	116,88%
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		%	100	
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :				
1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	98,93%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau				
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:				
1	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	%	56,86	56,66%
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		%	100	
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :				
1	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	100	70,88%

4.2.2. Perbandingan Capaian FLPP

Pada Tahun Anggaran 2020 target KPR FLPP adalah sebesar 102.500 unit rumah. Realisasi penyaluran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 109.253 unit rumah atau **106,59%**. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 dari target 68.858 unit tercapai 77.835 unit rumah atau **113,04%**. Melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Tahun Anggaran 2020 capaian kinerja KPR FLPP sedikit menurun 6,45%. Menurunnya persentase capaian kinerja KPR FLPP karena adanya penurunan daya beli dan juga minat pasar terhadap perumahan yang terdampak oleh Pandemi Covid-19.

4.2.3. Perbandingan Capaian SSB dan SBUM

Pada Tahun Anggaran 2020 target penyaluran SSB adalah sebesar 175.000 unit rumah. Realisasi penyaluran sampai dengan akhir TA. 2020 adalah sebanyak 90.362 unit rumah atau **51,64%**. Untuk tahun 2019, target penyaluran SSB adalah sebanyak 100.000 unit rumah dengan realisasi penyaluran sebanyak 143.149 unit rumah atau tercapai **143,15%**. Dari data tersebut, maka capaian TA. 2020 menurun sebesar **91,51%** dari TA. 2019. Realisasi penyaluran SBUM pada tahun 2020 adalah 130.264 unit rumah atau **49,50%** dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 263.000 unit rumah. Pada tahun 2019, target penyaluran SBUM sebanyak 237.000 unit rumah, dengan capaian 186.760 unit rumah atau **78,80%**. Jika capaian SBUM tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 maka mengalami penurunan sebesar **29,30%**.

Rendahnya capaian SSB dan SBUM tahun 2020 disebabkan oleh hal berikut:

- Menurunnya jumlah akad KPR / permintaan SSB dan SBUM karena pekerjaan dan kondisi ekonomi masyarakat terdampak Covid-19; dan

- Suku bunga sebagai acuan perhitungan Subsidi Bunga Kredit perumahan turun.

4.2.4. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran

A. BA. 033

Realisasi BA. 033 pada tahun 2020 sebesar Rp288.423.015.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp643.609.701.000,00 sehingga persentase realisasi sebesar 44,81%. Pada tahun 2019, realisasi BA.033 sebesar Rp454.032.704.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp485.430.539.000,00 sehingga persentase realisasi sebesar 93,53%.

Capaian realisasi tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar **48,72%**. Menurunnya capaian tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Adanya pandemi tersebut berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan dan rendahnya realisasi penyaluran BP2BT. Selain itu, usulan revisi anggaran terkait pengurangan alokasi anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Perbandingan realisasi Tahun 2020 dengan tahun 2019 pada masing-masing unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan PPDPP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21
Perbandingan Realisasi Antara BA. 033 Tahun 2019 Dengan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	2019				2020			
		PAGU (Rp 000,00)	REALISASI			PAGU (Rp 000,00)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK
			(Rp 000,00)	(%)	(%)		(Rp 000,00)	(%)	(%)
A	SATUAN KERJA PEMBIAYAAN PERUMAHAN - BA. 033	417.680.539	387.603.291	92,80	99,78	571.656.177	219.749.516	38,44	39,14
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	77.581.453	74.569.892	96,12	100,00	67.635.934	61.069.512	90,29	90,68
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	29.140.000	25.567.101	87,74	99,70	46.619.170	38.795.441	83,22	83,74
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	257.814.086	238.157.856	92,38	100,00	414.913.541	80.003.832	19,28	20,08
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	18.625.000	16.605.933	89,16	100,00	12.042.309	10.911.468	90,61	91,27
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	14.000.000	13.149.226	93,92	99,68	17.172.517	15.938.560	92,81	93,26
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20.520.000	19.553.283	95,29	100,00	13.272.706	13.030.703	98,18	98,62
B	SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	67.750.000	66.429.414	98,05	100,00	71.953.524	68.673.498	95,44	98,52
TOTAL B A. 033		485.430.539	485.430.539	93,53	99,81	643.609.701	288.423.015	44,81	45,78

B. BA. 999.03, Proyeksi Pengembalian Pokok, Saldo Awal FLPP

Realisasi anggaran untuk penyaluran FLPP pada tahun 2020 adalah sebesar Rp11.231.193.635.691,00 atau sebesar 102,10% dari target Rp11.000.000.000.000,00. Pada tahun 2019, realisasi anggaran untuk penyaluran FLPP sebesar Rp7.545.288.389.506,00 atau sebesar 99,28% dari target Rp7.600.000.000.000,00. Realisasi tahun 2020 meningkat **2,82%** dari tahun 2019.

C. BA. 999.07

BA. 999.07 merupakan mata anggaran untuk penyaluran SSB dan SBUM. Total anggarannya sebesar Rp5.721.982.299.000,00 yang terbagi untuk penyaluran SSB sebesar Rp4.657.982.299.000,00 dan SBUM sebesar Rp1.064.000.000.000,00.

Realisasi BA. 999.07 pada tahun 2020 sebesar Rp3.395.273.697.529,00 dengan persentase 59,33%. Dari realisasi tersebut, untuk penyaluran SSB sebesar Rp2.868.577.697.529,00 dengan persentase 61,58% dan untuk penyaluran SBUM sebesar Rp526.696.000.000,00 dengan persentase 49,47%.

Total realisasi BA. 999.07 tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar **38,01%**, dimana realisasi tahun 2019 sebesar 97,34%. Untuk penyaluran SSB pada tahun 2020 menurun **37,46%** dari tahun 2019 yang mencapai 99,04%. Sedangkan capaian SBUM menurun **40,60%** dari tahun 2019 yang mencapai 90,07%.

4.3. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengelola 4 (empat) mata anggaran, yaitu BA.033, BA.999.03, BA.999.07 dan BA.999.99.

A. BA. 033

Pagu BA. 033 Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan revisi adalah sebesar Rp643.609.701,00. Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp288.423.015,00 (44,81%) dengan realisasi fisik 45,78%. Rincian realisasi masing-masing Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

- Realisasi Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan pagu anggaran Rp571.656.177,00, pada akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp219.749.516,00 (38,44%) dengan realisasi fisik 39,14%; dan
- Realisasi Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dengan pagu anggaran Rp71.953.524,00, pada akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp68.673.498,00 (95,44%) dengan realisasi fisik 45,78%.

Detail penyerapan untuk masing-masing unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.22 Realisasi Masing-Masing Unit Kerja Eselon II

NO	UNIT KERJA	PAGU REVISI (RP 000,00)	REALISASI (RP 000,00)	RN (%)		RL (%)		KINERJA (%)
				KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	Rp571.656.177,00	Rp219.749.516,00	100	100	38,44	39,14	39,14
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp67.635.934,00	Rp61.069.512,00	100	100	90,29	90,68	90,68
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp46.619.170,00	Rp38.795.441,00	100	100	83,22	83,74	83,74
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp12.042.309,00	Rp10.911.468,00	100	100	90,65	90,61	91,61
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp17.172.517,00	Rp15.938.560,00	100	100	92,81	93,26	93,26
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp13.272.706,00	Rp13.030.703,00	100	100	98,18	98,62	98,62
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Rp414.913.541,00	Rp80.003.832,00	100	100	19,28	20,08	20,08
II.	BLU PPDPP	Rp71.953.524,00	Rp68.673.498,00	99,07	100	95,44	98,52	98,52
TOTAL BA.033		Rp643.609.701,00	Rp288.423.015,00	99,90	100	44,81	45,78	45,78

Sumber data: *emonitoring.pu.go.id* status 31 Desember 2020

B. BA. 999.03 dan Pengembalian Pokok

Mata anggaran BA. 999.03 dikelola oleh PPDPP untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain bersumber dari DIPA sebesar Rp9.000.000.000.000,00, dalam penyaluran FLPP juga menggunakan proyeksi pengembalian pokok yang nilainya Rp2.000.000.000.000,00, sehingga total anggaran penyaluran FLPP tahun 2020 sebesar Rp11.000.000.000.000,00 untuk menyalurkan 102.500 unit rumah. Realisasi keuangan FLPP tahun 2020 sebesar Rp11.231.193.635.691,00 (102,10%) untuk menyalurkan 109.253 unit rumah (106,59%). Berikut adalah tabel penyerapan anggaran untuk menyalurkan bantuan FLPP selama tahun anggaran 2020:

Tabel 4.23 Realisasi FLPP Per Bulan

No.	Bulan	Realisasi	
		Unit	Rp.
1	Januari	32	3.119.100.000
2	Februari	3.192	320.003.473.899
3	Maret	24.888	2.498.962.140.591
4	April	14.952	1.519.680.524.643
5	Mei	20.011	2.032.523.367.107
6	Juni	9.685	992.028.628.810
7	Juli	5.226	541.653.140.804
8	Agustus	7.725	809.964.904.227
9	September	7.144	762.403.858.040
10	Oktober	4.046	425.495.137.425
11	November	7.074	758.136.816.956
12	Desember	5.278	567.222.543.189
Jumlah		109.253	11.231.193.635.691

Sumber: <https://ppdpp.id/realisasi-2020/>

C. BA. 999.07

Mata anggaran BA. 999.07 dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan yaitu Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka

(SBUM). Total anggaran BA. 999.07 sebesar Rp5.721.982.299.000,00, untuk penyaluran Subsidi Selisih Bunga sebesar Rp4.657.982.299.000,00 dan Subsidi Bantuan Uang Muka sebesar Rp1.064.000.000.000,00.

Realisasi SSB pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.868.577.697.529,00 (61,58%) untuk menyalurkan 90.362 unit rumah (51,64%) dan pembayaran SSB menggulung. Untuk realisasi SBUM sebesar Rp526.696.000.000,00 (49,47%) untuk menyalurkan 130.264 unit rumah (54,93%). Total realisasi keuangan untuk BA. 999.07 adalah sebesar Rp3.395.273.697.529,00 atau sebesar 59,33%.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga menerapkan efektivitas dan efisiensi. Efisiensi merupakan suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Suatu proses organisasi dinyatakan efisien bila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Sedangkan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, ataupun kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil).

Berikut merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja melalui:

- Mengembangkan aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi mengenai bantuan pembiayaan perumahan yaitu Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang);

- Pelaksanaan promosi dan sosialisasi secara virtual, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan efisien, diantaranya adalah melaksanakan kegiatan pameran, sosialisasi dan edukasi program aplikasi SiKasep, sosialisasi dan edukasi pengembang (temu pengembang), dan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui *sms blast*, *mobile display ads*, media sosial, dan media cetak.
- Mengupayakan penggunaan kertas bekas untuk mencetak konsep-konsep laporan serta konsep surat. Selain itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga mengoptimalkan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) sehingga pimpinan dalam memberikan disposisi mengurangi penggunaan ATK.

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 berisi akuntabilitas kinerja yang merupakan capaian Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.

Dalam analisis capaian Indikator Kinerja Kegiatan dilakukan analisis pencapaian tahun 2020. Selain itu juga dilakukan analisis keberhasilan capaian kinerja, permasalahan atau kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah kebijakan penanganan serta rekomendasi yang sebaiknya dilakukan dalam peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja, dapat disimpulkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 dapat mencapai target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian **116,88%**. Berikut adalah beberapa hal yang merupakan penyebab keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja sasaran strategis:

- Mendorong proses penyiapan 2 (dua) proyek KPBU yaitu Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa, yang telah masuk ke dalam *PPP book*; dan
- Adanya upaya untuk mempercepat kajian dokumen *Feasibility Study* (FS) pada semua proyek KPBU yang menjadi target tahun 2020.

Namun, untuk indikator kinerja sasaran program masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan hanya tercapai **70,88%** dan Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif **98,83%**. Berikut permasalahan yang teridentifikasi dalam upaya memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut:

- Menurunnya jumlah akad KPR / permintaan SSB dan SBUM karena pekerjaan dan kondisi ekonomi masyarakat terdampak Covid-19;
- Suku bunga sebagai acuan perhitungan Subsidi Bunga Kredit perumahan turun;
- Pengembang lebih mengutamakan program bantuan subsidi perumahan lainnya dibandingkan BP2BT karena persyaratan relative lebih mudah;
- Pengembang memiliki kekhawatiran terhadap pencairan bantuan yang dinilai cukup besar dapat dicairkan tepat waktu;
- Bank pelaksana lebih selektif terhadap pemohon dengan pekerjaan yang terdampak Covid-19;
- Proses Permohonan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*/PDF) proyek Bendungan Merangin ke Kementerian Keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama karena sehingga menghambat proses transaksi KPBU Sumber Daya Air;

- MoU antara Kementerian PUPR dengan Kementerian ESDM tentang Optimalisasi Fungsi dan Pengembangan Bendungan Merangin masih diproses oleh Sesditjen SDA;
- Belum adanya PP turunan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang terkait dengan fungsi bendungan multiguna dan pendanaan infrastruktur SDA;
- Belum selesainya permasalahan status lahan (*splitsing* sertifikat dengan gedung perkantoran pusjatan, bast lahan dari DJBM ke DJP, lahan kandang sapi, dan status sewa jangka panjang/komersial);
- Skema pengembalian investasi (AP, HAM, dan VGF) belum dapat ditetapkan; dan
- Perencanaan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan air bersih, pembuangan sampah dan limbah belum teratasi untuk Rumah Susun Cisaranten.

5.2 REKOMENDASI

Dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan tersebut dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu melakukan langkah-langkah antara lain:

- Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menindaklanjuti Surat Kemenkeu Nomor S-479/MK.08/2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (Project Development Facility – PDF) Proyek KPBU Bendungan Merangin, dengan melakukan persiapan dokumen penilaian evaluasi permohonan PDF, antarlain: a) SK Tim KPBU; b) Hasil Konsultasi Publik; c) Rencana Penggunaan Skema AP, Informasi terkait Kapasitas Fiskal; dan d) Kajian yang memuat referensi internasional atas Proyek KPBU sejenis yang telah berhasil;

- Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan stakeholder terkait (Kementerian ESDM, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PT. PLN) terkait lingkup kerja sama dan PJPK Proyek KPBU;
- Menyusun usulan konsep muatan KPBU bidang SDA dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Menyusun draft Kepmen Pendelegasian Wewenang yang di dalamnya membahas kewenangan untuk mengatasi permasalahan status lahan;
- Menyusun usulan konsep surat konfirmasi pendahuluan proyek;
- Menyusun surat permohonan PDF dan kelengkapannya untuk dapat segera diajukan ke Kemenkeu; dan
- Merevisi perencanaan teknis dan mencari alternatif solusi untuk penyediaan sarana dan prasarana Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan - Ujung Berung

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus informasi kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan secara komprehensif kepada pihak-pihak terkait, serta sebagai masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020.

Lampiran I :

- Perjanjian Kinerja Eselon I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN -
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eko D. Heripoerwanto
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua



M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama



EKO D. HERIPOERWANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN			
1	Meningkatnya pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	1 Tingkat ketersediaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan	16%
		2 Tingkat aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah terhadap kemudahan dan/atau bantuan serta fasilitasi pembiayaan perumahan	15%

Program :

1. Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

BA. 033.08

BA. 999.03

BA. 999.07

Anggaran

Rp. 263.775.018.000

Rp. 9.000.000.000.000

Rp. 4.469.192.278.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



EKO D. HERIPOERWANTO

JAKARTA, JANUARI 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irma Yanti
 Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Eko D. Heripoerwanto
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
 Pihak Pertama

IRMA YANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Eselon I	1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		3) Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan
 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

Anggaran
 Rp 72.332.494.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
 Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
 Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
 Pekerjaan Umum dan Perumahan


IRMA YANTI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
1	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1) Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan 2) MOU Kerja Sama Pembiayaan Perumahan 3) Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 4) Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 5) Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 6) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 7) Layanan Perkantoran	5 Dokumen 1 MoU 7 Draft Jakstra dan NSPK 4 Profil Risiko 5 Dokumen 7 Laporan 1 Layanan

Kegiatan
Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Anggaran
Rp28.440.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi

HERRY TRISAPUTRA ZUNA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arvi Argyantoro**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama

ARVI ARGYANTORO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR			
1.	Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1) Jumlah perencanaan Pembiayaan infrastruktur sumber daya air	5 dokumen
		2) Jumlah penyiapan investasi infrastruktur sumber daya air	2 dokumen
		3) Jumlah penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur sumber daya air	1 dokumen
		4) Jumlah paket Pembiayaan infrastruktur sumber daya air	1 paket pembiayaan
		5) Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur sumber daya air	6 laporan

Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Anggaran
Rp 16.770.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Daya Air

ARVI ARGYANTORO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama


RENI AHIANITINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN			
1.	Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1) Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2) Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 3) Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 4) Layanan Perkantoran	6 Dokumen 4 Paket Pembiayaan 5 Laporan 1 Layanan

Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Anggaran
Rp 18.779.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Jalan dan Jembatan


RENI AHIANITINI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adang Sutara**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

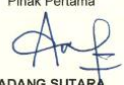
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama


ADANG SUTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
1	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	1) Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	2 Jakstra
		2) Pelaksanaan Investasi Perumahan	1 Paket Pembiayaan
		3) Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	3 Draft NSPK
		4) Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	6 Laporan
		5) Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312 Rumah Tangga
		6) Layanan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	8.460 Rumah Tangga
		7) Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan

1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan

Anggaran
Rp 38.600.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan


ADANG SUTARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bakti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN			
1.	Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1) Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	6 Dokumen
		2) Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	2 Paket Pembiayaan
		3) Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	6 Laporan
		4) Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Anggaran
Rp 16.900.000.000,00


Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

- Perjanjian Kinerja Eselon I (Revisi)



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eko D. Heripoerwanto
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua





M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Pertama



EKO D. HERIPOERWANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau		
IKSS: Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	56,10%	56,86%
SP Meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman		
1. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	71,44%	100%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		
IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	50,40%	72,39%
SP Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	50,40%	55,92
IKSS: Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100%
SP Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
1. Tingkat ketersediaan KPB infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100%
Program: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman -BA. 013 -BA. 999.03 -BA. 999.07 2. Program Dukungan Manajemen -BA. 013 -BA. 999.99 </div> <div> Anggaran Rp15.143.076.305.000 Rp421.094.006.000 Rp9.000.000.000.000 Rp5.721.982.299.000 Rp481.315.695.000 Rp222.515.695.000 Rp258.800.000.000 </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</p>  <p>M. BASUKI HADIMULJONO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>JAKARTA, OKTOBER 2020 DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</p>  <p>EKO D. HERIPOERWANTO</p> </div> </div>		



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : **Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Oktober 2020
Pihak Pertama

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	85%	100%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%

KEGIATAN

Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp46.619.170.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

HERRY TRISAPUTRA ZUNA



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arvi Argyantoro**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Oktober 2020
Pihak Pertama


ARVI ARGYANTORO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>	0%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%


KEGIATAN
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

ANGGARAN
Rp12.042.309.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR

ARVI ARGYANTORO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Oktober 2020
Pihak Pertama

RENI AHIANITNI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>JKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan</i>	25%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>JKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

ANGGARAN

Rp17.172.517.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN

RENI AHIANITNI

**REVISI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irma Yanti**
Jabatan : **Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Oktober 2020
Pihak Pertama

IRMA YANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjakannya dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan</i>	0%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
<i>IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	71,44%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	42%	50%

KEGIATAN

- Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan
- Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)

ANGGARAN

Rp414.913.541.000,00
Rp5.721.982.299.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPOERWANTO

PL. DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN

IRMA YANTI



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
Jabatan : **Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Oktober 2020
Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>JKSP. Tingkat Ketersediaan KPB Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>JKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	8,33%	23%
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>JKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,52%
SK. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>JKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
-BA. 033
-BA. 999.99

ANGGARAN

Rp272.072.706.000,00
Rp13.272.706.000,00
Rp258.800.000.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN

HARYO BEKTI MARTOYOEDO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Sabaruddin**
Jabatan : Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Oktober 2020
Pihak Pertama

ARIEF SABARUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memenuhi Kebutuhan Tugas Teknis PDPPP</i>	10%	10%
<i>IKK. Tingkat Pemenuhan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Teknis PDPPP</i>	15%	15%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
<i>IKSP 1. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	71,44%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	50%	50%

KEGIATAN

- Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
- Pengelolaan Dana Bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (BA. 999.03)

ANGGARAN

Rp71.953.524.000,00
Rp9.000.000.000.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

EKO D. HERIPOERWANTO

DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAAN DANA
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

ARIEF SABARUDDIN

Lampiran II : Berita Acara Kesepakatan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No.: 02 / BA / Dp / 2020

Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 bertempat di Sotis Hotel Kemang telah diadakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020, yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Rapat ini dimaksud untuk menghasilkan Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SS. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau		
IKSS. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	56,86%	
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00%	70,88%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSS. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	72,39%	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,92%	55,50%
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	116,88
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	98,93%

2. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU yang Masuk Tahap Lelang

NO	SEKTOR	TARGET RENSTRA TA. 2020		REALISASI**		
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sumber Daya Air	1	Rp4.787.000.000.000,00	0	-	0
2.	Jalan dan Jembatan	4	Rp41.706.500.000.000,00	6	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau; • Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci; • Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF); • Jalan Tol Semarang Harbour; • Penggantian Dan/Atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa; • Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi 	Rp63.481.300.000.000,00
3.	Perumahan	1	Rp1.100.000.000.000,00	0	-	0
4.	Permukiman	3	Rp6.597.125.614.184,00	3	<ul style="list-style-type: none"> • SPAM Regional Jatiluhur I; • SPAM Karian Serpong; • SPAM Kota Pekanbaru 	Rp4.607.737.499.380,00
TOTAL		9	Rp54.190.625.614.184,00	9		Rp68.089.037.499.380,00

Keterangan **: Termasuk proyek yang sudah FBC Final

3. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	UNIT KERJA	PAGU REVISI (RP 000,00)	REALISASI (RP 000,00)	RN (%)		RL (%)		KINERJA (%)
				KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	Rp571.656.177,00	Rp219.749.516,00	100	100	38,44	39,14	39,14
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp67.635.934,00	Rp61.069.512,00	100	100	90,29	90,68	90,68

NO	UNIT KERJA	PAGU REVISI (RP 000,00)	REALISASI (RP 000,00)	RN (%)		RL (%)		KINERJA (%)
				KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp46.619.170,00	Rp38.795.441,00	100	100	83,22	83,74	83,74
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp12.042.309,00	Rp10.911.468,00	100	100	90,61	91,27	91,27
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp17.172.517,00	Rp15.938.560,00	100	100	92,81	93,26	93,26
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp13.272.706,00	Rp13.030.703,00	100	100	98,18	98,62	98,62
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Rp414.913.541,00	Rp80.003.832,00	100	100	19,28	20,08	20,08
II.	BLU PPDPP	Rp71.953.524,00	Rp68.673.498,00	99,07	100	95,44	98,52	98,52
TOTAL BA.033		Rp643.609.701,00	Rp288.423.015,00	99,90	100	44,81	45,78	45,78

Sumber: <http://emonitoring.pu.go.id/>

4. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN	UNIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Rp9.000.000.000.000,00	102.500	Rp11.231.193.635.691,00	109.253
2	Subsidi Selisih Bunga (SSA/SSB)	Rp4.657.982.299.000,00	175.000	*) Rp2.868.577.697.529,00	90.362
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)	Rp1.064.000.000.000,00	263.000	Rp526.696.000.000,00	130.264
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)	Rp380.000.000.000,00	9.500	Rp53.864.000.000,00	1.357
5	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tabungan Perumahan Rakyat (SMF)	Rp521.172.000,00	8.460	Rp489.694.000,00	8.460

Keterangan : *) Realisasi keuangan SSB termasuk pembayaran SSB menggulung

5. Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,5%	13,50%
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	14,25%
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	98,13%
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%	24,56%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	25%
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25%	25%
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%

f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	24,25%
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	42,06%
3	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2%

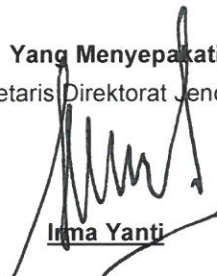
g. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memenuhi Kebutuhan Tugas Teknis PPDPP	10%	10%
2	Tingkat Pemenuhan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Teknis PPDPP	15%	15%
3	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	55,75%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan Terima kasih.

Jakarta, 30 Desember 2020

Yang Menyepakati
Sekretaris Direktorat Jenderal



Irma Yanti

Direktur Pengembangan
Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Pembiayaan



Herry Trisaputra Zuna

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur SDA



Arvi Argyantoro

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur Jalan
dan Jembatan



Reni Ahiantini

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman



**Meike Kencanawulan
Martawidjaja**

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan



Haryo Bakti Martoyoedo

Direktur Utama
BLU PPDPP



Arief Sabaruddin

Mengetahui,
Direktur Jenderal



Eko D. Heripoerwanto

Lampiran IV : Penghargaan - Penghargaan

Penghargaan

Kinerja Optimal Penyaluran Subsidi Perumahan Melalui Teknologi Aplikatif Property & Bank Award 2020



The Best Leadership in the Distribution of Affordable Housing Subsidies Property & Bank Award 2020



The Most Innovative Public Service Agency for Affordable Housing Estate Awards
2020



Pemenang TOP Digital Awards 2020



ISO Sistem Manajemen Mutu (SMM) 9001:2015



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

I. IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024, metode pengukuran untuk IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan **dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitas pembiayaan perumahan** dibandingkan dengan target. Pada tahun 2020, target jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitas pembiayaan perumahan adalah sebesar 295.460 unit rumah dengan realisasi 209.432. Adapun rincian secara lengkap dilihat pada tabel berikut:

Tabel Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

Bantuan Pembiayaan Perumahan	Target	Realisasi	Persentase
FLPP	102.500	109.253	106,59%
SSB	175.000	90.362	51,64%
BP2BT	9.500	1.357	14,28%
SMF	8.460	8460	100,00%
TOTAL	295.460	209.432	70,88%

II. IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024, metode pengukuran untuk IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

- Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%);
- Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%);
- Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (10%);
- Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (10%);

- Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%);
- Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik (10%);
- Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP (10%);
- Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP (15%);

Pada tahun 2020 capaian dari indikator di atas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00%	15,00%
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00%	15,00%
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00%	10,00%
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00%	10,00%
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00%	14,25%
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00%	10,00%
7	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memenuhi Kebutuhan Tugas Teknis PPDPP	10%	10%
8	Tingkat Pemenuhan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Teknis PPDPP	15%	15%
TOTAL		100%	99,25%

Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah 55,92%. Sehingga untuk mendapatkan realisasi IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR adalah:

$$99,25\% \times 55,92\% = 55,50\%$$

III. IKSP Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024, metode pengukuran untuk

IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebagai berikut:

- Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target (30%); dan
- Jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) (70%)

Pada tahun 2020, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah melakukan survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hasil survey menunjukkan nilai **67,50%** dari target yang ditetapkan 70,00%, sehingga capaian kinerja dari survey **96,43%**.

Untuk jumlah paket pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang adalah sebagai berikut:

NO	SEKTOR	TARGET RENSTRA TA. 2020	REALISASI**	
		JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK
(1)	(2)		(4)	(5)
1.	Sumber Daya Air	1	0	-
2.	Jalan dan Jembatan	4	6	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau; • Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci; • Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF); • Jalan Tol Semarang Harbour; • Penggantian Dan/Atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa; • Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi
3.	Perumahan	1	0	-
4.	Permukiman	3	3	<ul style="list-style-type: none"> • SPAM Regional Jatiluhur I; • SPAM Karian Serpong; • SPAM Kota Pekanbaru
TOTAL		9	9	

Dari tabel di atas, target 9 proyek yang siap lelang dapat tercapai **100%** di tahun 2020. Sehingga untuk capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebagai berikut:

$$(96,43\% \times 30\%) + (100\% \times 70\%) = 98,93\%$$

IV. IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024, metode pengukuran untuk IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebagai berikut:

- Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target (30%)
- Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang (70%))

Pada tahun 2020, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah melakukan survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hasil survey menunjukkan nilai **67,50%** dari target yang ditetapkan 70,00%, sehingga capaian kinerja dari survey **96,43%**.

Untuk nilai investasi/pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang adalah sebagai berikut:

NO	SEKTOR	TARGET RENSTRA TA. 2020	REALISASI**	
		NILAI INVESTASI	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI
1.	Sumber Daya Air	Rp4.787.000.000.000,00	-	0
2.	Jalan dan Jembatan	Rp41.706.500.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau; • Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci; • Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF); • Jalan Tol Semarang Harbour; • Penggantian Dan/Atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa; • Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi 	Rp63.481.300.000.000,00
3.	Perumahan	Rp1.100.000.000.000,00	-	0

NO	SEKTOR	TARGET RENSTRA TA. 2020	REALISASI**	
		NILAI INVESTASI	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI
4.	Permukiman	Rp6.597.125.614.184,00	<ul style="list-style-type: none"> • SPAM Regional Jatiluhur I; • SPAM Karian Serpong; • SPAM Kota Pekanbaru 	Rp4.607.737.499.380,00
TOTAL		Rp54.190.625.614.184,00	9	Rp68.089.037.499.380,00

Dari tabel di atas, target nilai investasi/pembiayaan KPBU sebesar **Rp54.190.625.614.184,00** dapat terealisasi **Rp68.089.037.499.380,00** atau **125,65%**. Sehingga untuk capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebagai berikut:

$$(96,43\% \times 30\%) + (125,65\% \times 70\%) = 116,88\%$$



Kementerian
PEKERJAAN UMUM dan
PERUMAHAN RAKYAT

